

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini keterlibatan perempuan di dalam dunia politik terkhusus dalam pemilihan umum sudah mengalami fluktuasi, peningkatan maupun penurunan. Munculnya kebijakan-kebijakan baru misalnya UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah direvisi menjadi UU No. 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, membuka peluang dan kesempatan kepada kaum perempuan untuk terlibat aktif dalam proses politik termasuk pemilihan umum. Namun masih saja ditemukan kesenjangan dilapangan, misalnya kesenjangan hak-hak, akses dan peran perempuan di dunia perpolitikan. Hal ini adalah bukti dari persoalan masih adanya ketidakadilan gender di Indonesia baik dalam struktur maupun budaya di dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya solusi perbaikan dalam mengatur pemenuhan hak-hak perempuan di dunia pemerintahan dan perpolitikan yang dapat membawa angin segar dalam perkembangan demokrasi di Indonesia (Imron, 2020 :15).

Selanjutnya, peran perempuan dan penempatan dalam kehidupan bernegara kembali menjadi pembahasan yang menarik dibahas untuk membawa perempuan kepada posisi yang dapat menempatkan kesetaraan gender di dalam bernegara termasuk dalam urusan politik. Namun kekuatan perempuan itu sendiri belum mampu mengatasi banyak masalah yang kerap mereka terima, seperti

pemeriksaan, dan bentuk kekerasan serta pelecehan seksual lainnya. Harus kita pahami bahwa meskipun sudah banyak tokoh perempuan yang hadir dan berpartisipasi di tanah air, disisi lain mereka juga menemukan hambatan dalam hal tampil dan berpartisipasi di tanah air ini. Sebagai contoh seperti peran perempuan dalam bidang politik yang bahkan hampir di seluruh negara, terutama di negara berkembang menghadapi berbagai kendala dalam berpartisipasi.

Dalam Muhadzir (2005 : 42), pergerakan perempuan dalam mencapai kesetaraan gender tidak lepas dari pengaruh pikiran Kartini yang sangat berambisi untuk mensejajarkan perempuan dengan laki-laki meskipun dia sendiri tidak mampu membebaskan dirinya dari budaya patriarki yang sangat kuat pada zaman itu. Kartini juga sangat menentang poligami meskipun akhirnya ia mau dipinang oleh laki-laki yang sudah beristri. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki diberbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain: 1). Melindungi perempuan, 2). Memberdayakan dan memenuhi hak- hak dasar perempuan, 3). Peningkatan kesejahteraan perempuan, 4). Pengembangan peran perempuan, 5). Komitmen konstitusi terhadap perempuan. Hal ini bisa sebagai upaya keseriusan dalam menyeimbangkan kesetaraan gender di Indonesia dalam upaya peningkatan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat (Eka 2008 : hal 8).

Mengenai Elit Politik, peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia perpolitikan juga mengalami peningkatan, seperti sudah mulai banyak perempuan

yang menduduki sektor-sektor penting pada partai politik sehingga perempuan tersebut bisa disebut sebagai elit politik perempuan. Dalam pengertian yang umum elit menunjuk pada sekelompok orang-orang yang ada dalam masyarakat dan menempati kedudukan tinggi. Dalam pengertian khusus dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan minoritas yang memegang kekuasaan.

Selanjutnya, pemilihan kepala daerah (PILKADA) merupakan perwujudan dari sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia. PILKADA merupakan salah satu pentas demokrasi yang berjalan sekali 5 Tahun. Pasal 1 angka 1 PP No. 6/2005, menjelaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan atau kabupaten/ kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah/wakil kepala daerah yang telah dirubah dengan PP No. 49/2008 tentang perubahan ketiga atas PP No. 6/2005 (Susanti, 2015: hal.4).

PILKADA serentak yang digelar pada tanggal 9 Desember tahun 2020 dimana salah satu daerah yang melaksanakannya yaitu Kota Medan. Berdasarkan data yang dikeluarkan KPU Kota Medan, ada 2 nama calon walikota/wakil walikota Kota Medan yakni pasangan Akhyar-Salman yang diusung oleh partai PKS dan Demokrat. Sedangkan pasangan Bobby-Aulia di usung oleh PDIP, GERINDRA, NASDEM, GOLKAR, PAN, PPP, dan GELORA.

Dalam PILKADA Kota Medan yang melagakan antara pasangan Akhyar-

Salman nomor urut 1 dan pasangan Bobby-Aulia nomor urut 2 telah selesai dilaksanakan. Dari rekapitulasi yang dilakukan pasangan nomor urut 01 Akhyar Nasution -Salman Alfarisi memperoleh 342.580 suara. Sementara pasangan nomor urut 02 Bobby Nasution-Aulia Rachman mendapatkan 393.327 suara. Dengan perolehan tersebut, maka pasangan Bobby-Aulia adalah sebagai pemenang dalam PILKADA Kota Medan tahun 2020. Ketua KPU Kota Medan Agussyah Damanik mengatakan, berdasarkan keputusan Nomor 175/pl.02.7-kpt/1271/kpu-kot/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam PILKADA Kota Medan 2020 menetapkan paslon nomor urut dua memperoleh suara 393.327 sebagai pemenang yang dilaksanakan di Hotel Arya Duta Medan, Kamis(18/2/2021).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan akhirnya menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020 sebanyak 1.614.615 pemilih. Ketua KPU Medan, Agussyah Ramadani Damanik mengatakan, berdasarkan 1.614.615 pemilih tersebut, pemilih dari perempuan lebih banyak dengan jumlah 825.903 orang dibanding pemilih dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 788.712 orang pemilih. Pasangan Akhyar-Salman memperoleh suara sebanyak 342. 580 suara sedangkan pasangan Bobby-Aulia memperoleh suara sebanyak 393.327 suara.

Partai PKS sendiri secara sah telah mendukung dan mengukung pasangan Akhyar-Salman untuk maju dalam PILKADA Kota Medan tahun 2020. Partai PKS sendiri berkoalisi dengan Partai Demokrat dalam PILKADA Kota Medan tahun

2020. Partai keadilan Sejahtera sendiri mendukung pasangan Akhyar-Salman karena Salman al-Farisi merupakan kader PKS. Itulah yang mendasari kenapa PKS mendukung pasangan Akhyar-Salman dalam PILKADA Kota Medan melawan pasangan Bobby-Aulia yang diusung oleh PDIP dan partai lainnya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan sendiri hadir sebagai sebuah partai politik yang tampilannya berbeda dibandingkan dengan partai politik yang ada. Mengingat PKS sebagai partai politik tidak hanya mengedepankan aspek politis dalam sepak terjangnya, tapi juga menjadikan moral agama sebagai basis gerakannya. Sehingga tidak jarang PKS dijuluki sebagai partai politik dakwah atau partai politik yang tampilannya lebih dirasakan sebagai gerakan dakwah (Dina, 2009:10).

Menurut Sapto (2005:30), Pendiri PKS kebanyakan memang dari kalangan anak muda aktifis masjid kampus, sehingga wajar bila dimasukkan ke dalam kotak modernis. Namun bila kita perhatikan lebih cermat, sejumlah pendiri PKS jelas-jelas berakar dari kalangan tradisional. Seperti, Salim Segaf al Jufri tercatat masih cucu pendiri Al Khairat yang cukup dominan di wilayah Indonesia bagian Timur, KH Rahmat Syafi'i tergolong murid KH. Abdullah Syafi'i (pendiri Asy Syafi'iyah dari Jakarta), Ahmad Heriawan adalah kader Persatuan Umat Islam (PUI), Daud Rasyid Sitorus berasal dari lingkungan Jamaah Al Washliyah di Sumatera Utara. Semuanya tercatat sebagai Dewan Pendiri PKS.

Sebagai partai yang mengemban misi dakwah, adalah ciri khas dari Partai Keadilan Sejahtera, yaitu silaturahmi dan minta nasihat dengan para ulama dan

tokoh agama setempat. Salah satunya adalah almarhum KH. Abu Hurairah, Pandai Kandangan, yang banyak memberikan nasihat cara berpolitik yang baik dalam rangka ibadah kepada Allah Swt.

Menurut Burhanuddin (2008:21) PKS adalah partai yang luar biasa dalam banyak hal. Tidak seperti partai politik lainnya, PKS mendapat simpati publik karena terus menerus memobilisasi konstituennya dasar dan tidak hanya pada saat pemilihan, beroperasi sebagai 'partai kader' yang membutuhkan ketat standar pelatihan dan perilaku anggota, dan pendampingan korban alam bencana dan kemiskinan di seluruh Indonesia. Pemeriksaan pembentukan PKS dan kerangka transnasional Islamis akan mengungkap berbagai faktor di baliknya kemunculannya dan proses transformasinya dari gerakan sosial menjadi Partai Politik.

Berdasarkan data yang didapat oleh penulis, pada Pemilihan Legislatif Kota Medan tahun 2019, partai PKS juga berhasil mendudukkan sebanyak 7 orang wakilnya di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan. Salah satu diantara 7 tersebut adalah perempuan atas nama Dhiyatul Hayati, S.Ag., M.Pd dengan suara sah sebanyak 8.843. Sedangkan di tingkat Provinsi, PKS berhasil mendudukkan 11 orang di bangku DPRD Sumatera Utara. Salah satu diantara 11 orang tersebut adalah perempuan atas nama Hidayah Herlina Gusti Nasution. Itu menandakan elit politik perempuan juga mampu bersaing dan berpartisipasi dengan baik di perpolitikan yang terjadi saat ini.

(<https://id.Wikipedia.org/wakilDPRD>).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan juga melibatkan perempuan dalam mengurus dan mengelola jalannya partai. Terbukti dari adanya elit politik perempuan yang memiliki jabatan di DPD PKS Kota Medan. Termasuk dalam hal PILKADA Kota Medan 2020, DPD PKS Kota Medan juga melibatkan elit politik perempuan dalam hal pemenangan pasangan Akyar-Salman untuk menduduki posisi walikota/wakil walikota kota medan periode 2021-2024.

Penulis di dalam penelitian ini memilih Partai Keadilan Sosial sebagai objek penelitian dikarenakan temuan penulis secara langsung dilapangan, dimana menemukan berbagai aktivitas elit politik perempuan sebagai upaya pemenangan pasangan Akhyar-Salman dalam PILKADA Kota Medan tahun 2020. Partai ini juga menarik diteliti karena merupakan partai yang terkenal baik dalam hal kinerja anggota partai dan kepedulian terhadap masyarakat. Banyak pemberitaan di media, serta perumusan kebijakan yang dirasa sangat berpihak kepada masyarakat terutama masyarakat dengan ekonomi rendah.

Oleh karena itu, penelitian ini dirasa sangat perlu untuk meneliti bagaimanakah Peran Elit Politik Perempuan DPD PKS Kota Medan Dalam upaya Pemenangan Pasangan Akhyar-Salman Pada PILKADA Kota Medan Tahun 2020. Hal ini didasarkan tentang semakin meningkatnya peran dan partisipasi yang dilakukan oleh kaum perempuan, juga termasuk elit politik perempuan dalam hal perpolitikan di Indonesia sebagai upaya dan bentuk dalam menciptakan demokrasi yang lebih baik.

1.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan agar tidak berkembangnya masalah dan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini dapat di batasi pada: Peran atau hal yang dilakukan oleh elit politik perempuan DPD PKS Kota Medan dalam pemenangan pasangan Akhyar-Salman pada PILKADA Kota Medan Tahun 2020.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah peran atau hal yang dilakukan oleh elit politik perempuan DPD PKS Kota Medan dalam pemenangan pasangan Akhyar-Salman pada PILKADA Kota Medan Tahun 2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penting atau hal-hal yang dilakukan oleh elit politik perempuan DPD PKS Kota Medan dalam pemenangan pasangan Akhyar-Salman pada PILKADA Kota Medan Tahun 2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan memperdalam ilmu tentang peningkatan kualitas hidup dan kesetaraan gender perempuan dalam berbagai sektor publik.

2. Secara Praktis:

Secara praktis penelitian ini berguna dalam memberikan masukan ataupun saran kepada Partai PKS dan partai lainnya perihal upaya yang bisa dilakukan dalam meningkatkan partisipasi atau peran elit politik perempuan dalam partai dan dalam membuat suatu kebijakan layaknya seperti elit politik laki-laki.